

Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung

The Effect of Effectiveness and Contribution of Local Tax Revenue to Local Government Revenue of Bandung District

Rina Amalia Putri Wahyuni

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: rina.amalia.amp16@polban.ac.id

Khozin Arief

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung, Bandung 40012

E-mail: khozin.arief@polban.ac.id

Abstract: *This research is a quantitative descriptive research. This research aims to determine the level of effectiveness and contribution of local taxes to the Local Government Revenue of Bandung District. Subjects in this research is Bandung District and Local Government Revenue in 2015-2019. This research was conducted by using quantitative methods with a descriptive approach. Sample in this research is 60 months from January 2015 to December 2019. Multiple linear regression was used in data analysis using SPSS Version 25.0. The results of this study indicate that the Effectiveness of Local Taxes (X_1) partially has no significant and positive effect on local government revenue (Y). While the Local Tax Contribution (X_2) is partially positive and significant effect on Local Government Revenue (Y) of 23,24%. Simultaneously the Effectiveness and Contribution of Local Taxes affect on Local Government Revenue was 25,6% while 74,4% was influenced by other causes outside this research.*

Keywords: *Effectiveness, Contribution, Local Taxes, and Local Government Revenue*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah sebagai tolak ukur potensi daerah dan besarnya subsidi Pemerintah Pusat merupakan faktor terpenting dalam mengukur kinerja pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Besarnya nilai PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap subsidi Pemerintah Pusat agar terwujud otonomi daerah yang mandiri, bertanggung jawab dalam mencapai titik berat otonomi daerah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut tabel target dan realisasi Pajak Daerah Kabupaten Bandung tahun 2015-2019:

Tabel. 1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran	Anggaran		Rasio Efektivitas
	Target	Realisasi	
	(Rp)	(Rp)	%
2015	303.670.000.000	340.007.248.935	111,97
2016	334.229.109.236	384.549.751.737	115,06
2017	375.310.000.000	465.249.439.944	123,96
2018	395.465.000.000	472.460.682.943	119,47
2019	462.176.000.000	525.068.992.918	113,61
Rata-rata			116,81

Berdasarkan tabel I.1 diatas, setiap tahunnya Pemerintah Kabupaten Bandung selalu menaikkan target pencapaian pajak daerah yang akan dipungut, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki sumber-sumber yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Kepala Bidang Pendapatan II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung, menyatakan bahwa tidak selamanya jumlah realisasi Pajak Daerah yang melampaui target bisa dikatakan baik, hal ini tergantung dari jumlah target yang ditetapkan itu apakah sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki atau tidak. Jika target yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dapat dicapai, dapat dikatakan bahwa dalam penetapan target tidak mencerminkan potensi dan keadaan yang sebenarnya dan hal tersebut tentu dapat mempengaruhi realisasi dari Pajak Daerah yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan dalam pemungutannya.

Disamping jumlah realisasi pajak daerahnya yang selalu dalam kategori efektif, Kabupaten Bandung memiliki jumlah angka Piutang Pajak Daerah yang sangat besar yang seharusnya bisa dipungut sebagai pendapatan pajak daerah. Piutang pajak adalah piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU Perpajakan belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan. Berikut ini adalah data Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bandung:

Tabel. 2 Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014-2018

Tahun	Piutang Pajak Daerah	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	Piutang Pajak Daerah Netto
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2014	387.372.331.952,58	179.009.883.619,64	208.362.448.332,94
2015	403.599.101.309,49	262.166.462.642,22	141.432.638.667,27
2016	434.032.221.008,97	288.965.363.080,89	145.066.857.928,08
2017	485.834.759.099,11	314.714.026.337,88	171.120.732.761,23
2018	513.801.578.091,65	340.302.891.596,22	173.498.686.495,43

Berdasarkan tabel I.2 diatas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah piutang pajak selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan nilai piutang pajak sekitar Rp. 66 Milyar karena dilakukannya penyisihan piutang pajak daerah yang dianggap sudah tidak dapat tertagih, namun dari tahun 2015 sampai dengan 2018 kembali mengalami kenaikan. Piutang pajak ini merupakan pajak yang terhutang yang harus dilunasi oleh setiap wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya. Sehingga bisa dikatakan tidak akan ada piutang yang menumpuk hingga periode selanjutnya.

Piutang pajak ini menjadi salah satu topik panas karena nilainya dalam kategori sangat tinggi. Dari sisi pemerintah, piutang pajak dapat diminimalkan dengan terus gencar melakukan penagihan dan *reminder* bagi wajib pajak untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo. Karena semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula jumlah piutang pajak suatu pemerintahan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak daerah, jika piutang pajak daerah dapat dimaksimalkan pemungutannya.

Pajak Daerah sebagai penyumbang terbesar dalam komponen PAD secara tidak langsung dapat mempengaruhi juga pada realisasi penerimaan PAD yang pertumbuhannya cenderung lambat dari tahun ke tahun. Dan berikut disajikan data kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung:

Tabel. 3 Penerimaan Pajak Daerah dan PAD Kabupaten Bandung serta Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD tahun 2015-2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penerimaan Pajak Daerah	Tingkat Kontribusi
	(Rp)	(Rp)	%
2015	775.564.771.822	340.007.248.935	43,84
2016	831.070.622.164	384.549.751.737	46,27
2017	909.482.556.214	465.249.439.944	51,16
2018	857.210.322.776	472.460.682.943	55,12
2019	1.025.354.252.358	525.068.992.918	51,21
Rata-rata			49,52

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yaitu Usman Sayogi Jhoni Bintara, menilai bahwa realisasi PAD daerah Kabupaten Bandung relatif masih kecil. Terlihat pada Tabel I.2 pertumbuhan PAD Kabupaten Bandung cenderung lambat, hanya berkisar puluhan miliar pertahunnya. Laju pertumbuhan ini seharusnya bisa lebih tinggi mengingat nilai rasio efektivitas Pajak Daerah sebagai sektor yang berkontribusi paling besar sudah dalam kriteria sangat efektif. Harus ada upaya yang luar biasa untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun-tahun mendatang. Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat besar jika digali dengan maksimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang peneliti kemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana laju pertumbuhan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.
2. Seberapa besar efektivitas Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.
4. Seberapa besar efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas penerimaan Pajak Daerah dan laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
4. Untuk mengetahui seberapa besar efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Kajian Pustaka

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli daerah dipandang sebagai salah satu indikator dalam mengukur ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat, dengan melihat tinggi atau rendahnya proporsi PAD terhadap APBD. Semakin tinggi jumlah PAD dalam APBD maka menunjukkan semakin kecil tingkat ketergantungan daerah tersebut kepada pemerintah pusat, begitupun sebaliknya.

2.2 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi Wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan atau program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Rumus yang digunakan dalam menghitung tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2.4 Kontribusi

Secara umum, kontribusi bermakna sebagai peran dalam hal keikutsertaan terhadap sesuatu kegiatan. Atau dapat juga dikatakan sebagai suatu kewajiban yang perlu dipenuhi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Analisis.

Untuk mengklasifikasikan kriteria kontribusi pajak daerah terhadap PAD digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Metode Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan analisis efektivitas dan kontribusi karena dari penulisan ini menguji teori yang sudah ada dengan memperhatikan prinsip-prinsip keilmuan yang mendasarinya. Penelitian ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang yang diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang memiliki peran penting dari setiap instansi yang penulis tentukan. Serta data dokumenter berupa Peraturan Perundang-Undangan dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung

beserta rinciannya. Sumber data yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada narasumber. Dan data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung Tahun 2015-2019, serta peraturan yang terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur dengan narasumber yaitu staff Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung. Serta data dokumentasi bersumber dari BKAD Kabupaten Bandung yang berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bandung, serta peraturan perundang-undangan.

3.2 Teknik Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara menghitung rasio dari masing-masing variabel, yaitu Efektivitas Pajak Daerah (X_1), Kontribusi Pajak Daerah (X_2), serta Pendapatan Asli Daerah (Y). Kemudian dihitung dan diolah dengan menggunakan program *software Statistical Product and Service Solution (SPSS)* versi 25.0 untuk menghasilkan perhitungan yang menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Profil Pemerintah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung terletak di cekungan Bandung dengan ciri khas dataran tinggi luas dibagian tengah yang dikelilingi pegunungan di sebelah barat, selatan, utara dan timurnya. Gunung yang ada di Kabupaten Bandung antara lain Gunung Patuha, Gunung Malabar, Gunung Papandayan, dan Gunung Manglayang.

Lambang Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 tahun 1956 tentang Penetapan Lambang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:



Gambar. 1 Lambang Pemerintah Kabupaten Bandung

4.2 Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil yang didapatkan penulis untuk menjawab rumusan masalah, dijelaskan pada pembahasan berikut.

4.2.1 Analisis Laju Pertumbuhan

Untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah guna mempertahankan keberhasilan dan bahkan meningkatkannya di tahun selanjutnya, salah satunya dapat dilakukan dengan menghitung laju pertumbuhan. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat laju pertumbuhan pajak daerah di Kabupaten Bandung, maka dapat dirumuskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Tingkat Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Daerah	Tingkat Laju Pertumbuhan	Kategori
	(Rp)	%	
2015	340.007.248.935	-	Tidak Berhasil
2016	384.549.751.737	13,10	Tidak Berhasil
2017	465.249.439.944	20,99	Tidak Berhasil
2018	472.460.682.943	1,55	Tidak Berhasil
2019	525.068.992.918	11,13	Tidak Berhasil

Rata-rata	11,69	
-----------	-------	--

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 11,69%, yang tergolong pada kategori tidak berhasil berdasarkan indikator kriteria tingkat laju pertumbuhan. Tingkat laju pertumbuhan pajak daerah tertinggi ada pada tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu sebesar 20,99%, dan tingkat laju pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu hanya sebesar 1,55%.

Tabel 5. Tingkat Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Laju Pertumbuhan	Kategori
	(Rp)	%	
2015	775.564.771.822	-	-
2016	831.070.622.164	7,16	Tidak Berhasil
2017	909.482.556.214	9,44	Tidak Berhasil
2018	857.210.322.776	-5,75	Tidak Berhasil
2019	1.025.354.252.358	19,62	Tidak Berhasil
	Rata-rata	7,61	

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Bandung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 sebesar 7,61%, yang tergolong pada kategori tidak berhasil berdasarkan indikator kriteria tingkat laju pertumbuhan. Tingkat laju pertumbuhan pajak daerah tertinggi ada pada tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 19,62%, dan tingkat laju pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2017 ke tahun 2018 yaitu mencapai angka negatif yaitu -5,75% karena besarnya Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp.52 Milyar.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Untuk memperoleh hasil pengujian yang baik, maka semua data yang dibutuhkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu agar tidak melanggar asumsi klasik yang ada, agar diperoleh hasil pengujian hipotesis yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta menghasilkan model regresi yang signifikan dan representatif. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu: Normalitas, Multikolinearitas, Autokorelasi, serta Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Tabel 6. *One Sample Kolmogorov -Smirnov Test*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Ln_Efektivitas	Ln_Kontribusi	Ln_PAD
N		50	50	50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,1811	3,4933	4,2091
	Std. Deviation	,11814	,29239	,22786
Most Extreme Differences	Absolute	,120	,107	,082
	Positive	,120	,107	,082
	Negative	-,078	-,078	-,075
Test Statistic		,120	,107	,082
Asymp. Sig. (2-tailed)		,070 ^c	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel output SPSS tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi atau Asymp.Sig (2-tailed) untuk Efektivitas Pajak Daerah (X_1) sebesar 0,070, Kontribusi Pajak Daerah (X_2) sebesar 0,200 dan Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,200. Besar signifikansi atas ketiga variabel tersebut sudah melampaui $\alpha=0,05$, maka dengan demikian sudah sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, dan dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2,623	,537		4,881	,000		
Ln_Efektivitas	,150	,281	,078	,533	,596	,748	1,337
Ln_Kontribusi	,361	,113	,463	3,180	,003	,748	1,337

a. Dependent Variable: Ln_PAD

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel Efektivitas Pajak Daerah (X_1) dan Kontribusi Pajak Daerah (X_2) mencapai 0,748 yang berarti $0,748 > 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) adalah seluruhnya senilai 1,337 yang berarti $1,337 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini.

3. Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

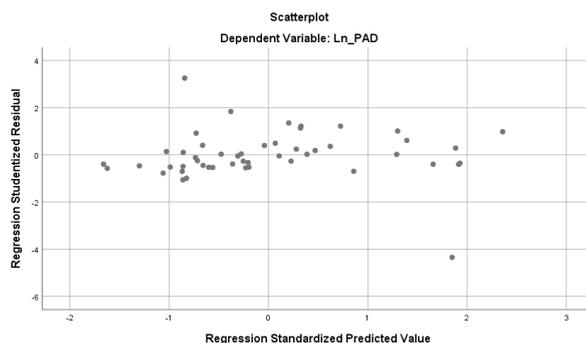
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,506 ^a	,256	,224	,20067	2,329

a. Predictors: (Constant), Ln_Kontribusi, Ln_Efektivitas

b. Dependent Variable: Ln_PAD

Berdasarkan tabel output “Model Summary” diatas, diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,329. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson pada signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen 2 ($k=2$) dengan jumlah sampel (n) = 50, maka diperoleh nilai D_u (batas dalam) = 1,6283 dan D_L (batas luar) = 1,4625. Batas atas nilai d_u untuk penelitian ini adalah 1,6283 sehingga $4-d_u$ adalah sebesar 2,3717. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai d sebesar 2,329 terletak diantara d_u dan $4-d_u$ ($1,6283 < 2,329 < 2,3717$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 2. Grafik Scatterplot Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil dari grafik scatterplot diatas, terlihat bahwa tidak terdapat pola tertentu yang terbentuk dan titik titik tersebut tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, melainkan titik-titik tersebut menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

1. Uji Hipotesis Secara Parsial (*T-Test*)

Tabel 9. Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,623	,537		4,881	,000
	Ln_Efektivitas	,150	,281	,078	,533	,596
	Ln_Kontribusi	,361	,113	,463	3,180	,003

a. Dependent Variable: Ln_PAD

Dengan melihat output SPSS diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. **Pertama.** Untuk variabel Efektivitas diperoleh t hitung sebesar 0,533 dengan nilai signifikansi 0,596, nilai t tabel diperoleh sebesar 1,67793 yang berarti $0,596 < 1,67793$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Daerah (X_1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,150, hal ini menunjukkan bahwa rasio efektivitas pajak daerah memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Angka positif yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa apabila efektivitas pajak daerah mengalami kenaikan maka angka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan yang tidak signifikan, begitupun sebaliknya. Jadi, untuk hipotesis yang diajukan yaitu “efektivitas pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah”, ditolak atau tidak dapat diterima.

Kedua. Untuk variabel Kontribusi diperoleh t hitung sebesar 3,180 dengan nilai signifikansi 0,003, nilai t tabel diperoleh sebesar 1,67793 yang berarti $3,180 > 1,67793$, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kontribusi Pajak Daerah (X_2) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). Hasil penelitian menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,361, hal ini menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Angka positif yang ditunjukkan mengindikasikan bahwa apabila kontribusi pajak daerah mengalami kenaikan maka angka pendapatan asli daerah akan mengalami kenaikan yang signifikan, begitupun sebaliknya. Jadi, untuk hipotesis yang

diajukan “kontribusi pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah”, dapat diterima.

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,506 ^a	,256	,224	,20067

a. Predictors: (Constant), Ln_Kontribusi, Ln_Efektivitas

b. Dependent Variable: Ln_PAD

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R² adalah sebesar 0,256 hal tersebut berarti 25,6% variabel PAD (Y) dapat dijelaskan oleh variasi kedua variabel independen yaitu Efektivitas Pajak Daerah (X₁) dan Kontribusi Pajak Daerah (X₂), sedangkan sisanya 74,4% dijelaskan oleh sebab lain diluar model regresi ini.

2. Uji Hipotesis Secara Simultan (*F-Test*)

Tabel 11. Hasil Uji Simultan (*F-Test*)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,652	2	,326	8,091	,001 ^b
	Residual	1,893	47	,040		
	Total	2,544	49			

a. Dependent Variable: Ln_PAD

b. Predictors: (Constant), Ln_Kontribusi, Ln_Efektivitas

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil Uji f menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,01 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Kemudian diperoleh F hitung sebesar 8,091 jika dibandingkan dengan F tabel senilai 3,19 maka diperoleh 8,091 > 3,19 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel pendapatan asli daerah. Artinya, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen yaitu Efektivitas Pajak Daerah (X₁) dan Kontribusi Pajak Daerah (X₂) secara bersama sama akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung.

5. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan antara lain yaitu, bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bandung tahun 2015 sampai tahun 2019 sudah tergolong dalam kategori efektif karena rata-rata realisasi penerimaan pajak daerah telah mencapai target tiap tahunnya sehingga didapatkan angka rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah selama 5 tahun sebesar 116,81%. Secara parsial, efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung dengan nilai signifikansi (0,596) > 0,05 dan t hitung (0,533) < nilai t tabel (1,67793). Faktor utama yang menyebabkan hal ini terjadi adalah karena tidak konsistennya rasio efektivitas yang dapat dijelaskan oleh perhitungan rumus efektivitas. Rasio efektivitas sudah menunjukkan kriteria sangat efektif namun tidak selaras dengan pertumbuhan pendapatan asli daerah.

Selain itu, tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bandung tahun 2015 sampai tahun 2019 tergolong kategori baik dengan rata-rata rasio kontribusi selama 5 tahun yaitu sebesar 49,52%.). Secara parsial, kontribusi penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Bandung dengan nilai signifikansi

0,003 < 0,05 dan t hitung (3,180) > t tabel (1,67793). Dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bandung selalu mengalami peningkatan presentase kontribusi pada realisasi Pajak Daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan selalu melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya beberapa upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah tersebut.

Adapun saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang telah dilakukan yaitu meskipun tingkat pencapaian penerimaan pajak daerah atas target yang telah ditetapkan selalu meningkat dari tahun ke tahun dan sudah ada dalam kategori efektif, pemerintah daerah harus tetap memperhatikan konsistensi yang selaras dengan tren persentasenya (rasio) yang cenderung masih berfluktuatif, serta kontribusinya masih perlu ditingkatkan. Serta diperlukannya upaya-upaya yang dilakukan secara terus menerus dalam meningkatkan hasil Pendapatan Asli Daerah, khususnya dalam sektor pajak daerah dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Sri P, SE. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Pontianak*. Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura, Pontianak 2013.
- <http://www.bandungkab.go.id>. Diakses pada 06 April 2020 pukul 15.00 WIB
- <http://www.dara.co.id/bupati-pad-kabupaten-bandung-harus-tembus-rp1-triliun.html>
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2015-2019.
- Santoso, S. 2010. *Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.